

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama dan ditempat tersebut anggota-anggotanya melakukan regenerasi.<sup>1</sup>

August Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia sehingga manusia bertalian secara golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Menurut Koentjaraningrat, mendefinisikan masyarakat sebagai satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama.<sup>2</sup>

Kehidupan bermasyarakat diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang menjiwai semua pasal, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercermin dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2):

---

<sup>1</sup> Jamaludin, Adon Narulloh, *Sosiologi Perkotaan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015). h. 6.

<sup>2</sup> Ibid, h. 15.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama, serta hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran. Pemerintah memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara yang memberikan jaminan untuk kehidupan yang aman dan layak bagi setiap masyarakat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepatisan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Adanya hak penghidupan yang layak bagi masyarakat ini agar terciptanya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Pasal 1 ayat 1:

“Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”<sup>3</sup>

Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan nya. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuskan.<sup>4</sup>

Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa semua orang adalah sama dan memiliki hak dalam kehidupan yang merupakan anugrah dari sang maha pencipta. Kurangnya perhatian atas pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas, menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah Indonesia, sudah seharusnya menjadi

---

<sup>3</sup> Rukminto Adi, Isbandi, *Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.23.

<sup>4</sup> Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 10.

tugas pemerintah dalam menjalankan peraturan sesuai dengan hukum dengan adil. Begitu juga pemenuhan jaminan hak penyandang disabilitas.

Permasalahan penyandang disabilitas adalah permasalahan yang kompleks, adanya kecatatan tentu saja menimbulkan masalah mobilitas karena adanya keterbatasan pada fungsi organ tubuh yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat menghambat penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Keadaan seperti itu dapat menimbulkan keadaan rawan psikologis yang ditandai sikap emosional yang labil dari orang non disabilitas.

Permasalahan jasmani penyandang disabilitas dari kecacatan seseorang dapat mengakibatkan gangguan fisik untuk melakukan suatu kegiatan/gerakan. Permasalah yang berhubungan dengan kegiatan keterampilan sehari-hari. Seperti permasalahan mental psikologis, dengan kondisi kecacatan akan mempengaruhi aspek kejiwaan klien sehingga akan mempengaruhi skala sikapnya tidak percaya diri. Dengan adanya keterbatasan sesungguhnya mereka memiliki kemampuan, potensi dan bakat untuk dikembangkan.

Permasalahan Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya wawasan berfikir, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penyandang disabilitas, hingga dalam realitasnya sosialisasi dan adaptasi dilingkungan nampak masih kurang percaya diri. Permasalahan sosial masyarakat, yang memiliki warga yang disabilitas akan turut terganggu kehidupannya, selama penyandang disabilitas tersebut belum mampu mandiri dan selalu menggantungkan hidupnya pada orang lain.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat khususnya Pasal 6 menyatakan bahwa setiap Penyandang Cacat berhak memperoleh; pendidikan pada semua saluran, jalur, dan jenjang Pendidikan, pekerjaan panghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil.

Hasilnya adalah aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat. Kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi Penyandang Disabilitas anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam pengembangan potensi atau bakat penyandang disabilitas dimulai dengan potensi yang dimilikinya. Sehingga hasilnya akan menjadi acuan bentuk dan jenis pelatihan yang cocok bagi penyandang disabilitas.

Dalam mendukung perlindungan Penyandang Disabilitas di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan perlindungan Penyandang Cacat antara lain tertuang pada Pasal 5, bahwa setiap aspek kehidupan dan penghidupan serta setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan tersebut ; dan Pasal 6, bahwa rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Penyelenggaraan perlindungan Penyandang Disabilitas di bidang sosial di Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Nomor : 21 Tahun 2008 tentang dinas daerah Provinsi Jawa Barat (perubahan Perda Nomor ; 15 Tahun 2002 tentang dinas daerah Provinsi Jawa Barat, melalui sistem panti dan luar panti dalam upaya meningkatkan

dan mengembangkan kemandirian Penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Cibabat-Cimahi merupakan unit Pelaksana Teknis dinas di lingkungan dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Balai ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 2008 tentang dinas daerah dan Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ketetapan tersebut berubah lagi berdasarkan Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang disabilitas Cibabat – Cimahi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Khususnya penyandang disabilitas mental, sensorik netra, rungu wicara dan tubuh. Panti Sosial Rehabilitasi menyelenggarakan sebagai tugas teknis operasional dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang merupakan urusan pemerintahan daerah Provinsi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Meliputi aspek penerimaan dan penyuluhan, rehabilitasi sosial serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang disabilitas.

Melihat dari permasalahan yang terjadi bahwa penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dalam mengembangkan kemandiriannya. Sehingga

penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan adanya UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Cibabat-Cimahi dapat melaksanakan fungsinya untuk membimbing dan membina penyandang disabilitas. Perubahan perilaku penyandang disabilitas setelah melaksanakan rehabilitasi di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas terlihat dari seberapa berfungsinya UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dengan bagaimana model rehabilitasi sosial yang di laksanakan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik penelitian tentang model rehabilitasi dan interaksi sosial penyandang disabilitas, untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Model Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat Cimahi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan, ada beberapa masalah yang menjadi faktor keinginan penulis untuk bisa menggali lebih dalam tentang model rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas. Adapun yang menjadi ketertarikan penulis pada permasalahan ini:

1. Keterbatasan fisik penyandang disabilitas sehingga tidak dapat melakukan fungsi sosialnya.
2. Karena keterbatasan fisik tidak dapat berkomunikasi dengan baik.
3. Karena keterbatasan fisik tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat.

4. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak dapat hidup mandiri dan bekerja karena tidak memiliki keterampilan khusus.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Lembaga Rehabilitasi Sosial.
6. Kesulitan lembaga rehabilitasi menangani penyandang disabilitas.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikaji, untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang akan ditentukan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi?
2. Bagaimana pelaksanaan Program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi?
3. Bagaimana keberhasilan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dalam perubahan perilaku penyandang disabilitas setelah menerima program pelayanan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikembangkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi.



2. Untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi.
3. Untuk mengetahui keberhasilan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dalam perubahan perilaku penyandang disabilitas setelah menerima program pelayanan.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian tentang model rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teori sosiologi dalam sosiologi pembangunan dan menemukan ilmu tentang membina dan merehabilitasi penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perubahan perilaku penyandang disabilitas, melalui lembaga UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan penelitian ini dapat diteliti kembali oleh peneliti-peneliti lainnya. Selain kegunaan teoritis dan praktis terdapat kegunaan dan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, maupun klien penyandang disabilitas, diantaranya:

- 1) Bagi Klien Penyandang Disabilitas



Dapat dijadikan suatu pembelajaran yang akan dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan dan memberikan pengetahuan dan keterampilan setelah menerima program pelayanan rehabilitasi.

2) Bagi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Dapat memberikan kontribusi tentang bagaimana program yang sesuai untuk klien penyandang disabilitas dalam menumbuhkan cara berinteraksi dan berkomunikasi di masyarakat.

3) Bagi Pemerintah Jawa Barat

Dapat memberikan kontribusi bagaimana memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Masalah sosial merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari satu sistem sosio-kultural.<sup>5</sup> Individu dan masyarakat merupakan aspek yang komplementer dari realitas sosial yang besar, yaitu kehidupan sosial. Karena itu, disorganisasi sosial bisa timbul pada masyarakat maupun diri individu. Disorganisasi sosial mengakibatkan runtuhnya fungsi pengontrol dari lembaga atau institusi sosial dan memberikan kemungkinan kepada individu-individu untuk bertindak laku semua sendiri tanpa kendali, tanpa control, dan tanpa penggunaan pola sosial tertentu. Lenyapnya fungsi pengontrol dari institusi masyarakat dan kemunculan formalisme, sehingga lembaga tersebut berfungsi secara eksternal di luar individu,

---

<sup>5</sup> Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 1*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 4.

menyebabkan ditinggalkannya individu secara internal tanpa bimbingan dan tanpa pola umum.

Faktor saling mempengaruhi dan saling berkaitan satu sama lain sehingga terjadi dinamis, dan bisa mempengaruhi tingkah laku manusia. Terjadilah perubahan tingkah laku dan perubahan sosial sekaligus timbul perkembangan yang tidak imbang dalam kebudayaan, ketidakmampuan penyesuaian diri, konflik-konflik dan tidak adanya consensus. Munculah banyak disorganisasi, disintegrasi dan penyimpangan tingkah laku atau perilaku patologi.<sup>6</sup>

Patologi sosial menyatakan adanya penyimpangan-penyimpangan psikologis atau kelas-kelas detektif dalam masyarakat. Bentuk-bentuk tingkahlaku yang menyimpang secara sosial sangat ditolak oleh umum seperti homoseksual, alkoholisme dan gangguan mental tertentu.<sup>7</sup>

Permasalahan yang ada dalam masyarakat yaitu adanya masyarakat yang mengalami penyandang disabilitas ini merupakan permasalahan yang kompleks, adanya kecatatan tentu saja menimbulkan masalah mobilitas karena adanya keterbatasan pada fungsi organ tubuh yang tidak sempurna. Masalah pertumbuhan penyandang disabilitas menyebabkan ketidakmampuan menyesuaikan diri secara emosional. Jika seseorang mengalami hambatan fungsi organ tubuh diyakini orang tersebut akan mengalami hambatan dalam kehidupannya.

Permasalahan jasmani penyandang disabilitas dari kecacatan seseorang dapat mengakibatkan gangguan fisik untuk melakukan suatu kegiatan atau gerakan.

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 7

<sup>7</sup> Ibid, h. 8

Gangguan tersebut berhubungan dengan kegiatan keterampilan sehari-hari. Yaitu permasalahan mental psikologis dengan kondisi kecacatan akan mempengaruhi aspek kejiwaan klien sehingga akan mempengaruhi skala sikapnya tidak percaya diri.

Dalam mendukung perlindungan Penyandang Disabilitas di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan perlindungan Penyandang Cacat antara lain tertuang pada Pasal 5, bahwa setiap aspek kehidupan dan penghidupan serta setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan tersebut ; dan Pasal 6, bahwa rehabilitasi diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang disabilitas Cibabat – Cimahi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental, sensorik netra, rungu wicara, tubuh. Menyelenggarakan sebagai tugas teknis operasional dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang merupakan urusan pemerintahan daerah Provinsi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas meliputi aspek penerimaan dan penyuluhan, rehabilitasi sosial serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang

disabilitas. Dengan mengadakan program pelayanan umum dan program pelayanan pendukung.

Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa dilakukannya bimbingan penyandang disabilitas membawa dampak yang cukup positif bagi perubahan perilaku penyandang disabilitas sebelum dan setelah menerima program pelayanan di panti tersebut. Untuk itu sangat penting untuk mengkaji tentang program apa saja atau model apa yang dilaksanakan di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi agar peneliti dapat mengetahui perubahan penyandang disabilitas sebelum dan sesudah menerima program pelayanan.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**

